



## BUPATI ROKAN HILIR

### PENGUMUMAN 814.1/BKPSDM-PPIP/2019/33

#### TENTANG

#### **PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/P5308/IV/19.01, Tanggal 1 April 2019 tentang Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK TAHUN 2019**

##### **Lampiran I**

rekap hasil seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahun 2019 (rincian) yaitu semua peserta yang telah mengikuti Seleksi Kompetensi berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K26-30/P5308/IV/19.01, Tanggal 1 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019. Sedangkan peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran pengumuman ini dengan tanda lulus "P/L" pada kolom Keterangan.

Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu :

1. **P** adalah Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan RB No 4 Tahun 2019;
2. **TP** adalah Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan RB No 4 Tahun 2019;
3. **L** adalah Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi;
4. **TL** adalah Tidak Lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi;
5. **TMS** adalah Tidak Memenuhi Syarat.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional PPPK tahun 2019.

#### **II. PEMBERKASAN**

1. Nama nama dan Jadwal Pemberkasan bagi peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir akan diberitahukan lebih lanjut setelah diterbitkan Penetapan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Dokumen persyaratan pemberkasan :
  - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir (Lampiran II.a), yang ditulis dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK serta diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), rangkap 2 (dua).

- 2) Asli dan Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (rangkap 2).
- 3) Fotokopi Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang dilegalisir pejabat berwenang bagi Pelamar yang belum tercantum Akreditasi di ijazahnya (rangkap 2).
- 4) Asli dan Fotocopy Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/ Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diampu, Kabupaten/ Kota/Provinsi (asli dan 1 lembar fotocopy dilegalisir) .
- 5) Daftar Riwayat Hidup (Lampiran II.b) yang **ditulis dengan tangan sendiri** memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, ditandatangani dan diberi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan ditempel pas foto 4x6 dengan latar belakang warna merah rangkap 2 (dua) sesuai dengan Anak Lampiran III Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019.
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (asli dan 1 lembar fotocopy dilegalisir).
- 7) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang terbaru (asli dan 1 lembar fotocopy dilegalisir dari Dokter Pemeriksa).
- 8) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan / lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang terbaru (asli dan 1 lembar fotocopy dilegalisir dari Dokter Pemeriksa).
- 9) Surat Pernyataan (Lampiran II.c), **diketik**, ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), rangkap 2 (dua), sesuai dengan Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019.
- 10) Pas foto 4x6 berlatar belakang merah dan Pas foto 3x4 berlatar belakang merah (masing-masing 5 lembar dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut).
- 11) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Foto copy Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP elektronik dari Dukcapil, rangkap 2 (dua) dilegalisir.
- 12) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Honorer yang dilegalisir oleh Kepala OPD (rangkap 2).
- 13) Berkas kelengkapan dokumen rangkap 2 (dua) dimasukkan kedalam stopmap :
  - a. Warna biru untuk Tenaga Guru.
  - b. Warna merah untuk Tenaga Penyuluhdi luar stopmap ditulis :
  - a. Nama
  - b. Tempat dan Tanggal Lahir
  - c. Nomor Telp./HP

3. Apabila terdapat peserta PPPK yang tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri.
4. Peserta tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk PPPK apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut
  - a) Keabsahan Surat lamaran sesuai yang ditentukan.
  - b) Kebenaran data dalam daftar riwayat sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan.
  - c) Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan.
  - d) Keabsahan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai yang ditentukan.
  - e) Keabsahan Surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursos dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan.

### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Panitia seleksi dapat mengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan.
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dapat menghubungi :
  - a. Sdr. H. Junaidi Saputra, SH, MH, M.Si, Kabid Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kab. Rohil Hp. 085265920000/08527175333 pada hari Senin s.d Jumat (jam kerja).
  - b. Sdr. Irma Manja, S.Sos, Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai Hp. 081365719245
  - c. Sdr. Agung Ade Wibowo, ST Hp. 081215627058.

Demikian Pengumuman Hasil Akhir Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2019 ini diumumkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**LAMPIRAN II a. Format Surat Lamaran**

Bagansiapiapi, April 2019  
Kepada Yth,  
Bapak Bupati Rokan Hilir  
di  
Bagansiapiapi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Pendidikan :  
Unit Kerja Penempatan :  
Alamat Domisili :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019, dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (rangkap 2).
2. Daftar riwayat hidup bermaterai (asli rangkap 2).
3. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian resort/kepolisian daerah yang masih berlaku (1 asli dan 1 fotokopi legalisir).
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani (1 asli dan 1 fotokopi legalisir).
5. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (1 asli dan 1 fotokopi dilegalisir).
6. Surat pernyataan sesuai dengan anak lampiran IV Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 bermaterai (asli rangkap 2).
7. Pas foto 4x6 dan 3 x 4 berlatar belakang merah (masing-masing 5 lembar).
8. Fotokopi legalisir kartu tanda penduduk (KTP)/surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari Dukcapil (rangkap 2).
9. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dilegalisir Kepala OPD (rangkap 2).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar sesuai yang dipersyaratkan, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

hormat saya,

materai  
Rp.6000

( )

**b. Format Daftar Riwayat Hidup**

PAS FOTO  
4X6

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**I. KETERANGAN PERORANGAN**

1	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	*	
2	Nama	*	
3	Kabupaten/Kota Tempat Lahir	*	
4	Tanggal Lahir	*	
5	Jenis Kelamin		
6	Agama/Aliran Kepercayaan		
7	Status Perkawinan		
8	Email		
9	Nomor Telp/HP		
10	Alamat	a. Jalan	
		b. Kelurahan/Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten/Kota	
		e. Provinsi	
11	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	
		b. Berat badan (Kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk muka	
		e. Warna kulit	
		f. Ciri khas	
		g. Cacat tubuh	
12	Kegemaran (Hoby)		

\*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok dan tinta hitam





3. Orang Tua Kandung

No	NIK	NIP **	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Hidup

4. Saudara Kandung

No	NIK	NIP **	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Hidup

5. Bapak/Ibu Mertua

No	NIK	NIP **	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Hidup

VI. KETERANGAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan Organisasi	Masa Kerja		Tempat	Pemimpin Organisasi
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai		



VII. KETERANGAN LAIN-LAIN

No	Nama Keterangan	Surat Keterangan		
		Nomor	Tanggal	Pejabat
1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian			
2	Surat Keterangan Sehat			
3	Surat Keterangan Bebas Napza			
4	Keterangan Lain Yang dianggap perlu			

Demiikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah.

....., April 2019

Yang Membuat

Materai  
Rp. 6.000,-

(.....)

PERHATIAN :

1. Pada bagian \* Harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan hurup Kapital/balok dan tinta hitam.
2. Pada bagian \*\* diisi hanya jika CPNS/PNS/Pensiunan PNS

**c. Format Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 27 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000
-----------------

( ..... )